

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arikunto, S. (2002). *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Mitra Hukum.
- Atmosudirjo, S. P. (1994). *Hukum Administrasi Negara, Cet. Kesepuluh*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Azhary, T. (1992). *Negara hukum: suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, implementasinya pada periode negara Madinah dan masa kini*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Batubara, C. (1986). *Pokok-Pokok kebijaksanaan Perumahan dan Pemukiman*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Erwin, M. (2012). *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Erwin, M. (2015). *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Gunarsa, A., & Sidharta, B. A. (2013). *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Penerbit Refika Aditama.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara*. Jakarta: Bina Ilmu.
- HR. R. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kansil, C.S.T., & Kansil, Christine. (2009). *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Mahmud Marzuki, P. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mangesti, Y.A. & Tanya, B.L. (2014). *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Manullang, E. F. M., & Berkeadilan, M. H. (2007). *Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Jakart: Penerbit Buku Kompas.

- Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (1993). *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, S. (1999). *Mengenal Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsan. (2000). *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Partamo, A.P. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: CV Arkola.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu hukum [Legal studies]*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, L., Sos, S., & Putra, I. W. (1993). *Hukum sebagai suatu sistem*. Remaja Rosdakarya.
- Rato, D. (2010). *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Riawan, W.T. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Universitas Atmajaya Jogjakarta.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Sidharta, Arief. (2007). *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Ed. Baru, Cetakan 38. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia UI-Press).
- Soetjipto, R. (1983). *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Tanya, B. L. dkk. (2013). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Cetakan IV. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2013). *Teori Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Utrecht, E. (1989). *Pengantar dalam Hukum Indonesia, disadur dan direvisi oleh Moh. Saleh Djindang*, Cetakan Kesebelas, Jakarta: Sinar Harapan.

Tjandra, W.R. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Waluyo, B. (1991). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia. (2011). Laporan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Jakarta: BPHN.

Hadjon, P. M. (1998). Tentang Wewenang Pemerintahan (bestuurbevoegdheid). *Pro Justitia*, 16(1).

Hasanah, H. (2004). Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia. *Jurnal Unikom*, 3.

La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. (2000). Investor protection and corporate governance. *Journal of financial economics*, 58(1-2), 3-27.

Lindbeck, A. (2006). *The welfare state-Background, achievements, problems* (No. 662). Sweden IFN working paper.

Syafrudin, A. (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung*.

PENELITIAN

Lamandasa, R. F. (2011). *penegakan hukum, dikutip dari Fauzie Kamal Ismail* (Doctoral dissertation, Tesis berjudul Kepastian Hukum Atas Akta notaris Yang Berkaitan Dengan Pertanahan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok).

MD, M.M. (2009). Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “*Saatnya Hati Nurani Bicara*” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Suharto, E. (2006, July). Negara kesejahteraan dan reinventing depsos. In *Makalah disampaikan pada Seminar yang bertema “Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia”* dilaksanakan di Wisma MMUGM, Yogyakarta.

Suharto, E. (2006, July). Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia? Dalam makalah yang disampaikan pada *Seminar Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Edi Suharto/WelfareStateDepos/2006* (Vol. 21).

Stevenson, J., & FR, M. I. (2021). Pemberlakuan Sistem Satu Orang Satu Suara (One Man One Vote) Dalam Pemilihan Pengurus Dan Pengawas Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(4), 841-857.

Yamin, M. (1959). Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI. *Sekretariat Negara RI. Jakarta*.

WEBSITE

Asshiddiqie, J. *Gagasan Negara Hukum*. Pengadilan Negeri Sitoli, diakses dari https://pn.gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada 20 Juni 2021.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun*, diakses dari http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1423:pembentukan-perhimpunan-penghuni-rumah-susun-prps&catid=102&Itemid=182 pada 10 Oktober 2021 pukul 14.00 WIB.

Hukumonline.com, *Affirmative Action*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6904/affirmative-action/> pada tanggal 18 September 2021 pukul 16.00 WIB.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 133 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Pengelolaan Rumaah Susun Milik.

